

BAB III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP) yang mencakup urusan pemerintahan Provinsi dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP melalui pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2014 tentang lembaga lain dan merupakan pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat, sekaligus mengintegrasikan BKPPMD dengan BPPT, dimana kedudukan BPMPT adalah unsur pelayanan masyarakat dibidang penanaman modal dan perizinan.

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang andal dan profesional, perlu membaca peraturan perundangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPMPT Provinsi Jawa Barat, antara lain:

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 2011, yang meliputi : 1). Kebijakan Penanaman Modal 2). Kerjasama Penanaman Modal 3). Promosi Penanaman Modal 4). Pelayanan Penanaman Modal 5). Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 6). Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan 7). Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2010 tentang pelayanan Publik,

- dimana tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi: 1) Pelaksanaan pelayanan, 2) Pengelolaan pengaduan masyarakat, 3) Pengelolaan informasi, 4) Pengawasan Internal, 5) Penyuluhan kepada masyarakat dan 6) Pelayanan konsultasi.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu jo. Peraturan Gubernur No. 92 Tahun 2014 tentang Juklak Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011 tentang penanaman modal jo Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2014 tentang Juklak Perda No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal.
 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tugas pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat.

Dengan disyahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, jenis pelayanan perizinan (izin dan non izin) yang menjadi kewenangan BPMPT Provinsi Jawa Barat bertambah menjadi 261 jenis perizinan, terdiri dari izin sebanyak 148 jenis izin dan 113 jenis non izin, yang sebelumnya berjumlah 205 jenis perizinan.

Atas dasar tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan sesuai peraturan perundangan dan kedudukan BPMPT sebagai unsur pelayanan masyarakat dibidang penanaman modal dan perizinan serta hasil evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPMPT provinsi Jawa Barat, telah teridentifikasi beberapa permasalahan dalam 6 (enam) aspek sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat

Aspek Kajian	Capaian kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BPMPPT Jabar		
			Internal	Eksternal			
1. Pelaksanaan pelayanan;	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Penanaman Modal Belum memenuhi standar /Target 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 2011 ttg SPM bidang Penanaman Modal Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2013 ttg RPJMD Prov Jabar Tahun 2013-2018 Permenpan & RB No 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Thd Penyelenggaraan Yanlik Permenpan No.1/2015. ttg Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Yanlik 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana, Data profil peluang investasi belum <i>up to date</i> SOP dan Standar Pelayanan belum <i>up to date</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya. Lemahnya koordinasi dengan Kab/Kota dan stakeholder Belum adanya kesamaan persepsi aparaturnya pelayanan di semua tingkatan Belum jelasnya mekanisme dan Fungsi Biro-Biro di Setda dlm proses perizinan strategis . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. PP 38 Tahun 2007, dan Perda Jabar 10/2008 	Pelayanan (Kebijakan, Promosi, Kerjasama, Dalak, Pengelolaan Data & SIM dan Penyebarluasan Diklat) PM belum dapat dilaksanakan secara optimal		
	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Administrasi Perizinan Belum memenuhi standar/ Target Dgn Nilai IKM th 2013 dan 2014 : 75,75 & 78,96 (B) dari Target A 				Pergub 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	Belum adanya kesamaan persepsi aparaturnya pelayanan di semua tingkatan	Pelayanan Perizinan belum memenuhi Target IKM
	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi Perizinan BPMPPT saat ini 261 jenis/ 24 bidang, belum mencakup seluruh kewenangan Perizinan Provinsi. 						Kewenangan Pelayanan Perizinan Kewenangan Provinsi belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> Pengaduan Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal belum mencapai Target 	<ul style="list-style-type: none"> Permenpan & RB No. 24 / 2014 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Yanlik Secara Nasional Jo No. 3 / 2015 ttg Roadmap Pengembangan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya dukungan bentuk unit kelembagaan, Kurang memadainya sarana pengaduan, Perlunya penyempurnaan mekanisme pengelolaan pengaduan, 	<ul style="list-style-type: none"> Kurang jelasnya rincian informasi pengaduan atas pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengaduan atas Proses Perizinan yang 	Belum Optimalnya Fungsi Tim Taskforce Penanganan Permasalahan Penanaman Modal yang dibentuk sesuai Keppub No. Tahun 2012		
	<ul style="list-style-type: none"> Pengaduan Proses Pelayanan Perizinan 				Masih rendahnya kinerja pengaduan perizinan terpadu pada BPMPPT		

Aspek Kajian	Capaian kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BPMPPT Jabar
			Internal	Eksternal	
	Terpadu Belum mencapai target	<ul style="list-style-type: none"> Permenpan & RB No 15/ 2014 ttg Pedoman Standar Pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> SDM pelaksana yang msh perlu peningkatan kompetensi 	disampaikan ke BPMPPT	
3. Pengelolaan informasi;	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Infrastruktur dan Sistem informasi pelayanan perizinan belum berjalan dengan baik. 	SE Mendagri No. 500/1191/V/BANGDA/2009 Tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belum semua jenis izin yang dikelola dapat diinformasikan karena belum disusunnya mekanisme dan prosedur perizinan terutama izin yang bersifat strategis	Belum semua OPD teknis mengintegrasikan perizinan kepada BPMPPT	Belum terinformasikan jenis-jenis perizinan yang bersifat strategis kepada publik.
	<ul style="list-style-type: none"> Data base dan aplikasi perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> SE Mendagri No. 500/1191/V/BANGDA/2009 Tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 	Sistem penyimpanan Data Base belum tersedia (Filing System)	Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD Teknis	Akurasi data tidak optimal, dan tidak ada data base sebagai kendali untuk monitoring penyelenggaraan pelayanan perizinan.
4. Pengawasan internal;	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal belum memenuhi Target	<ul style="list-style-type: none"> Perka BKPM RI No. 3 Tahun 2012 ttg Dalak PM Perka BKPM No. 4 Tahun 2014 ttg SPIPISE Perka BKPM No 14 Th 2011 Ttg SPM Bid PM 	Belum memenuhi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas yanlik	<ul style="list-style-type: none"> Permenpan & RB No 52/2014 ttg Pddoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi bersih dan melayani 	
	Monev Pelayanan Perizinan Terpadu belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> Permenpan & RB No 31 Th 2014 ttg Pedoman MYSTERY SHOPPING Penyelenggaraan Yanlik Pergub 92/2014 ttg Juklak Perda No. 7/2010 ttg PPT Komitmen Pemprov Jabar dengan KPK pelaksanaan Model <i>Island of Integrity</i> vide Kepgub No. 061/1362-Org/2010 ttg OPD/Unit Kerja Model Island of Integrity di Jabar . 			Hasil IKM Pelayanan Perizinan belum memenuhi target
5. Penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi.	Kinerja Pengelolaan Penyuluhan dan Pelayanan Konsultasi kepada	<ul style="list-style-type: none"> Permenpan & RB No 30 Th 2014 ttg Pedoman Inovasi Yanlik 	<ul style="list-style-type: none"> Kualifikasi dan kuantitas SDM pelaksana 	Belum adanya koordinasi dan penyamaan persepsi dengan Instansi di	Belum optimalnya fungsi pelayanan penyuluhan dan konsultasi pada BPMPPT

Aspek Kajian	Capaian kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BPMPT Jabar
			Internal	Eksternal	
	masyarakat masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> Permenpan & RB No 35 Th 2012 ttg Pedoman SOP AP Pergub 48/2014 Kepgub No. 024/Kep.823-BPPT/2011 tgl 14 Juni 2011 ttg. Unit Layanan Keliling (Site Mobile Service) Pelayanan Perizinan Terpadu. 	<p>msh kurang</p> <ul style="list-style-type: none"> Sarpras pendukung msh terbatas SOP belum tersedia 	Pusat , OPD Teknis Provinsi dan Kab/Kota.	
6. Sumber Daya Aparatur	Masih terbatasnya Kompetensi SDM BPMPT dalam melaksanakan tugas pelayanan penanaman modal dan perizinan.	<ul style="list-style-type: none"> Kepmenpan No.KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. SE Mendagri No. 500/1191/V/BANGDA /2009 Tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Standar Kompetensi. 	Belum meratanya tingkat pengetahuan dan ketrampilan SDM pelayanan perizinan.	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan Kebutuhan Pegawai dari BKD belum direalisasikan sesuai kebutuhan pelayanan perizinan yang berkompeten. Permenpan & RB No 52/2014 ttg Pedoman pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi bersih dan melayani 	Menjadi salah satu faktor keterlambatan dalam proses pengolahan perizinan
	<ul style="list-style-type: none"> S.d. akhir thn 2014 jumlah SDM BPMPT dibidang pelayanan perizinan baru berjumlah 42 orang, jauh dari jumlah kebutuhan minimal Belum dilaksanakan Analisa Jabatan untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan perizinan 	Analisa Jabatan	Pendayagunaan SDM yang ada	Pemenuhan SDM oleh OPD belum sesuai kebutuhan. Formasi kebutuhan SDM belum difasilitasi OPD terkait	Pengaturan & distribusi tugas kepada pelaksana melebihi kapasitas/ tugas ganda sehingga kualitas hasil pekerjaan kurang memuaskan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan disusun sebagai penjabaran dan mempertimbangkan keberlanjutan dari penetapan penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi seperti yang tertuang pada RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013 - 2018.

3.2.1. Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Visi adalah merupakan impian yang kuat, konsisten dan berorientasi jauh ke depan, kemana suatu organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 – 2018, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013, yang hendak dicapai adalah : "**Jawa Barat Maju Dan Sejahtera Untuk Semua**".

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Penjabaran makna yang terkandung dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

Maju : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya

serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

- Sejahtera** : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.
- Untuk Semua** : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat, Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan serta berperan aktif dalam pergaulan dunia dan, Keterbukaan informasi pembangunan serta terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

3.2.2. Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap organisasi dengan baik, menggambarkan dengan jelas akan tujuan suatu organisasi dan fokus pada sasaran yang ingin dicapai ke depan. Misi merupakan penjabaran dari visi dan kedua-duanya harus sejalan.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2013 ditetapkan dalam 5 (lima) Misi, yaitu :

Misi Pertama, ***Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing***. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berahlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.

Misi Kedua, ***Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan***. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Misi Ketiga, ***Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik***. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota.

Misi Keempat, ***Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dengan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan***. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

Misi Kelima, ***Mengokohkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, peran Pemuda dan Olahraga serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal***. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang

Masalah kesejahteraan, seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.

Tabel 3.2.
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : "Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua".				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 2 Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan			
	1. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan perizinan yang belum optimal	- Data profil peluang investasi belum <i>up to date</i> . - Lemahnya koordinasi dengan Kab/Kota dan stakeholder	Adanya Forum PTSP sebagai salah satu sarana koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/ Kota
	2. Program Pemanjapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah	Belum optimalnya Tim Teknis dalam pelaksanaan pengolahan perizinan		Adanya anggaran khusus untuk Tim Teknis dalam melaksanakan proses peninjauan lapangan
2.	"Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik"			

	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD Teknis	Belum optimalnya penggunaan aplikasi perizinan yang ada saat ini	Adanya aplikasi perizinan baru yang sedang dikembangkan
	2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	.		
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sumber daya aparatur BPMPT sebagian besar adalah karyawan baru, sehingga belum berkompeten dalam pelayanan perizinan	Kompetensi pegawai yang menangani di pelayanan perizinan sangat sedikit	OPD teknis mendukung dalam memberikan wawasan melalui Bimtek kepada pegawai BPMPT
	4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi perizinan belum sesuai dengan tuntutan masyarakat	Terbatasnya anggaran yang belum mencukupi kebutuhan dasar kantor.	Komitmen Pemprov Jabar dalam reformasi birokrasi pelayanan publik
	5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana prasarana yang ada belum sesuai standard SPM	Terbatasnya anggaran	Dukungan OPD teknis terkait
	6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan sarana dan prasarana di beberapa gerai	Koordinasi dengan BKPP	
	7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Koordinasi dengan bidang-bidang dalam pelaporan capaian kinerja		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Telaahan Renstra Kementerian atau Lembaga yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan

Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dan yang mempengaruhi terhadap penanganan permasalahan baik faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong dapat terlihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan BPMPT Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan BPMPT Prov. Jawa Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BKPM-RI (2010-2014) Misi 3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.			
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing.	<ul style="list-style-type: none"> BKPM menetapkan BPMPT Jabar masuk kualifikasi Bintang 3 berdasarkan penilaian PT. Surveyor Indonesia Th. 2010 dan belum bisa menangani perizinan Investasi Asing (PMA). Dalam implementasi Pelayanan Perizinan Investasi secara teknis masih terkendala belum optimalnya SPIPISE yang dikelola BKPM di Jakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> BPMPT belum dapat mencapai durasi waktu proses sesuai ketentuan Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 dan Tim Teknis OPD yang terkait Investasi belum berfungsi secara optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian Aparatur BPMPT telah mengikuti Diklat PTSP dan SPIPISE yg diselenggarakan BKPM. Dukungan Pendampingan Pengoperasian SPIPISE oleh BKPM berjalan sampai sekarang..

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan BPMPT Prov. Jawa Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	DEPUTI PELAYANAN PUBLIK KEMENPAN & RB. (I KU):			
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan yg berstandar pada peraturan yang berlaku. 	Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan belum Optimal	Terbatasnya anggaran BPMPT.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai Permenpan &RB Nomor 36/2012 ttg Standar Pelayanan Depdagri No. 500/1191/V/Bangda ttg Penyempurnaan Pedoman Nasional PPTSP
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 	Frekwensi dan Capaian Hasil Survey IKM masih terbatas dan perlu ditingkatkan.	Terbatasnya anggaran BPMPT	Permenpan & RB No.16 Thn 2014

Guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terhadap sasaran Renstra pada Kabupaten/Kota yang mempengaruhi pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat ditinjau dari sasaran Jangka menengah dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan BPMPT Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Kabupaten/kota	Permasalahan Pelayanan BPMPT	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BPMPT KOTA TASIKMALAYA			
	<i>Misi 1:</i> Mewujudkan pelayanan prima yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum terintegrasi- 	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran Terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Telah dibentuknya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Kabupaten/kota	Permasalahan Pelayanan BPMPT	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p><i>Misi 2:</i> Mewujudkan sumber daya aparatur pelayanan berkualitas dan profesional</p> <p><i>Misi 3:</i> Meningkatkan sistem informasi manajemen pelayanan yang berbasis E-Government</p>	<p>nya informasi Potensi Penanaman Modal dan Proses Perizinan yang diterbitkan Kab/Kota terkait Perizinan Paralel dan menjadi persyaratan perizinan kewenangan Provinsi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Kebutuhan SDM belum terpenuhi. • Sarpras Pendukung Pelayanan Belum Maksimal. 	<p>Forum PTSP di Jawa Barat. Dan Kepala BPMPT Jabar sebagai Ketua, yang mengacu SE Depdagri No.500/1191/V/Bangda/2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya sistem aplikasi perizinan baru dari Kemeninfo yang nantinya diharapkan dapat dikembangkan menjadi sistem informasi pengelolaan perizinan dengan PTSP Kab/Kota dan menjadi Subsistem atau Interface dengan SPIPISE yang dikelola BKPM.
2	BPMPT KABUPATEN KARAWANG			
	<p><i>Misi 1:</i> Mewujudkan iklim investasi yang kondusif</p> <p><i>Misi 2:</i> Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi</p> <p><i>Misi 3:</i> Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dapat dilaksanakan nya pembinaan Pelaksanaan PM dan perizinan Kab/Kota yang menjadi Tupoksi BPMPT, sbg bahan kebijakan Pemprov Jabar. • Belum adanya koneksifitas sistem informasi pengelolaan PM dan perizinan dengan PTSP Kab/Kota. 		
3	BPMPTPM KABUPATEN MAJALENGKA			
	<p><i>Misi 1:</i> Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan amanah</p> <p><i>Misi 2:</i> Meningkatkan pelayanan yang cepat, efektif, responsif, inovatif dan akurat</p> <p><i>Misi 3:</i> Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan berbasis Teknologi</p> <p><i>Misi 4:</i> Meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pelayanan perizinan</p> <p><i>Misi 5:</i> Pengkakselerasian promosi dan investasi</p>			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam melaksanakan peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan di Jawa Barat, BPMPT telah menelaah terhadap RTRW Provinsi Jawa Barat yang terbagi atas 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), yaitu:

- WP Bodetabekpunjur;
- WP Purwasuka;
- WP Ciayumajakuning;
- WP Priangan Timur-Pangandaran;
- WP Sukabumi dan;
- WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung.

Tabel 3.5
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Penempatan Ruang Pada Periode 2013 – 2018	Pengaruh Rencana Strategik Terhadap Kebutuhan Pelayanan BPMPT Prov. Jabar	Arahan Lokasi Pengembangan OPD
1.	WP Bodebekpunjur; Pengembangan industri pertanian, pariwisata	WP Bodebekpunjur ; Industri manufaktur, pertanian, pariwisata	Kegiatan dan kerjasama Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu diseluruh wilayah pengembangan	Diperlukan penambahan sarana prasarana dan anggaran serta peningkatan kualitas SDM sesuai Tupoksi BPMPT Provinsi Jawa Barat	Industri/manufaktur di Kab/Kota Bekasi, Kab/Kota Bogor, Kota Depok dan Kab. Cianjur (pertanian dan pariwisata)
2.	WP Purwasuka; Pembangunan pelabuhan Cilamaya dan bandara Karawang	WP Purwasuka; Persiapan pelabuhan Cilamaya dan bandara Karawang			Pertanian, perikanan/ kelautan di Karawang dan Subang, industri pengolahan dan pariwisata di Purwakarta dan Subang
3.	WP Ciayumajakuning; Pembangunan BIJB	WP Ciayumajakuning; Persiapan BIJB			Agrobisnis/ agroindustri dan perikanan di Kuningan dan Majalengka, pariwisata di

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Penempatan Ruang Pada Periode 2013 – 2018	Pengaruh Rencana Strategik Terhadap Kebutuhan Pelayanan BPMPT Prov. Jabar	Arahan Lokasi Pengembangan OPD
					Kuningan, Majalengka dan Cirebon, serta perikanan dan pertambangan di Indramayu
4.	WP Priatim-Pangandaran; Pembangunan waduk Jatigede	WP Priatim; Persiapan waduk Jatigede			Pertanian, pariwisata dan pertambangan di WP Priatim
5.	WP Sukabumi; Pembangunan Pelabuhan Samudra	WP Sukabumi; Persiapan pelabuhan samudra			Perikanan dan bisnis kelautan di Pelabuhan Ratu, pertanian di seluruh WP Sukabumi, pertambangan di Sukabumi/ Cianjur
6.	WP Khusus Cekungan Bandung; Pengembangan kawasan khusus pendidikan Jatinangor	WP Khusus Cekungan Bandung; Kawasan pendidikan			Pertanian, industri kreatif, pariwisata di seluruh WP khusus cekungan Bandung

Sementara berdasarkan dokumen Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kebijakan pelayanan kinerja BPMPT yang harus dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan BPMPT Provinsi Jawa Barat berdasarkan Analisis
KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Lebih selektif dalam memilih investasi yang akan ditanamkan di Jawa Barat agar tidak mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Banyaknya investasi di Jawa Barat di sektor industri manufaktur yang akan mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan	Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi industri manufaktur masih merupakan andalan	Keinginan pemerintah provinsi dan kab/kota untuk lebih memprioritaskan investasi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta agro industri
2.	Lebih hati-hati dalam menawarkan jenis peluang investasi di bidang industri kepada investor	Pembangunan terutama di sektor industri mempunyai dampak dan resiko yang cukup merugikan bagi lingkungan hidup	Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi industri manufaktur masih merupakan andalan	Banyak potensi yang dimiliki Jawa Barat di sektor primer yaitu : pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang tidak merugikan bagi lingkungan hidup
3.	Potensi investasi yang ditawarkan kepada investor haruslah yang dapat meningkatkan kinerja layanan/jasa ekosistem	Kinerja layanan/jasa ekosistem pada saat ini sudah sangat menurun jauh	Banyaknya industri manufaktur yang menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan	Adanya regulasi baik di pusat maupun di daerah dalam pengendalian pencemaran
4.	Promosi potensi sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dilakukan secara selektif kepada investor yang peduli akan lingkungan	Pemanfaatan sumber daya alam terutama yang tidak terbarukan perlu dilakukan secara efisien karena persediaannya semakin sedikit	Banyaknya industri di Jawa Barat sehingga memerlukan energy yang cukup besar	Banyaknya potensi sumber daya alam yang terbarukan di Jawa Barat sehingga tidak mengandalkan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat, kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) agar sesuai dengan tujuan pembentukannya terutama penyelenggaraan Pemerintahan dalam konteks *"Clean Governance"* yang *pro-poor*, *pro-growth*, dan *employment* sebagai *triple track* yang menganut 8 prinsip dasar dalam pelayanan penanaman modal dan perizinan, yaitu (1) Asas kepastian hukum; (2) keseimbangan; (3) ketidakberpihakan, (4) kecermatan; (5) tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau mencampur adukkan kewenangan; (6) keterbukaan; (7) profesionalitas; (8) kepentingan umum.

Dijelaskan dalam RJPMD bahwa isu-isu strategis mengenai permasalahan pembangunan di Jawa Barat di bidang Ekonomi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian antara lain: belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah, kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*, masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dan pelayanan publik yang belum sesuai harapan masyarakat.

Oleh karena itu dalam Upaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tersebut, Aparatur BPMPT dituntut untuk memiliki kemampuan tinggi dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan transparan dalam melakukan segala sesuatu kegiatan. Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi BPMPT Provinsi Jawa Barat, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya.

Isu strategis yang akan ditangani Renstra BPMPT Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 – 2018 diantaranya adalah :

1. Data profil peluang investasi belum *up to date*.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan promosi investasi.
3. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai SPP
4. Belum terdapat SPM dalam pelaksanaan pelayanan publik.
5. SPP dan SOP belum *up to date*.
6. Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait.
7. Tim Taskforce Penanganan Permasalahan Penanaman Modal dan Tim teknis dari OPD terkait belum berfungsi secara Optimal.
8. Belum tergalinya potensi perizinan di wilayah BKPP.
9. Konektifitas jaringan dengan OPD teknis belum berfungsi.
10. Masih Lemahnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan stakeholder.
11. Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya.

